

PEMILIHAN LOKASI IBUKOTA KABUPATEN DI WILAYAH PROYEKSI PEMEKARAN KABUPATEN BEKASI UTARA

Muhamad Isro Fachrurrizal ✉ Rahma Hayati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords:

Regional Expansion, Capital location

Abstrak

Kabupaten Bekasi yang secara geografis berada di sebelah timur dari Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah pendukungnya (hynterland), dengan demikian pembangunan daerah dapat menjadi lebih cepat. Melihat juga di Kabupaten Bekasi sudah terdapat banyak industri besar sehingga mampu memberikan masukan pendapatan daerah yang cukup besar. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui kondisi sarana prasarana transportasi 2) mengukur tingkat aksesibilitas 3) mengukur interaksi wilayah dan 4) memberikan pertimbangan lokasi ibukota untuk calon Ibukota Kabupaten Bekasi Utara. Metode penelitian adalah metode penelitian survei, dengan obyek penelitian adalah kecamatan yang menjadi calon lokasi ibukota di daerah proyeksi pemekaran wilayah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bekasi yang sedang berproses untuk pemekaran wilayah. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, perhitungan dengan Accesibility index, model gravitasi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian berupa pertimbangan lokasi ibukota baru di daerah proyeksi pemekaran Kabupaten Bekasi Utara, dengan lokasi prioritas pertama berada di Kecamatan Sukatani.

Abstract

Bekasi Regency which geographically reside in eastside from DKI Jakarta Provinsi become one of its supporter area (hynterland), thereby the area development can become quicker. See also in Bekasi Regency have there are a lot of big industry so that able to give big enough area earnings input. The purpose of the study to: 1) Determine the condition of transportation infrastructure 2) measuring the level of accessibility 3) measuring the region's interaction and 4) giving consideration for the location of the capital of North Bekasi District. The research method that will be used is the survey method, with the research object is the district that will become a candidate for location of the capital in the projection of regional expansion. Research was conducted in Bekasi District which being proceed to a regional expansion. Data collection techniques are including observation, documentation, and interviews with questionnaires. Data analysis techniques used in the study is a descriptive analysis and calculation with accessibility index, gravity models, and scale analysis. Results of the research is a consideration of the new capital location in projection of regional expansion of North Bekasi District, which the first priority location is in Sukatani District.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: geografiunnes@gmail.com

ISSN 2252-6285

PENDAHULUAN

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. (UU No. 32 Tahun 2004). Pemerintah daerah selaku penerima kewenangan otonomi daerah dituntut untuk memberikan pelayanan publik dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Aspek aksesibilitas yaitu tingkat kemudahan untuk memperoleh pelayanan umum merupakan tolak ukur pemerintahan yang baik (Sadyohutomo, 2008:123).

Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Legalisasi pemekaran daerah dapat dilakukan apabila suatu daerah telah mencapai batas usia penyelenggaraan minimal, untuk pembentukan provinsi disyaratkan sepuluh tahun, kabupaten/kota disyaratkan tujuh tahun dan kecamatan minimal lima tahun. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. (PP No. 78 Tahun 2007). Pemekaran daerah sering terjadi karena adanya ketidakmerataan ekonomi daerah dan kondisi geografis yang terlalu luas sehingga mengakibatkan jauhnya rentang kendali pemerintahan dan sulitnya mengakses fasilitas-fasilitas publik. Gagasan pemekaran wilayah merupakan fenomena yang mengiringi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan termasuk hal yang baru di Indonesia.

Kabupaten Bekasi yang secara geografis berada di sebelah timur dari Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah pendukungnya (hynterland), dengan demikian pembangunan daerah dapat menjadi lebih cepat. Melihat juga di Kabupaten Bekasi sudah

terdapat banyak industri besar sehingga mampu memberikan masukan pendapatan daerah yang cukup besar. Namun demikian hal tersebut hanya dirasakan oleh sebagian dari masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi, hal ini terjadi akibat pembangunan daerah yang tidak merata dimana fokus pembangunan hanya terjadi di daerah yang secara geografis berada di bagian selatan dimana daerah ini berdekatan dengan ibukota kabupaten yaitu Kota Cikarang. Kondisi yang demikian menyebabkan adanya ketimpangan wilayah dimana daerah di wilayah bagian utara kabupaten kesulitan mengakses pelayanan publik dan pembangunan daerahnya yang cenderung tertinggal.

Dari hal diatas tentu memunculkan keinginan dan aspirasi dari masyarakat untuk mengadakan pemekaran wilayah sebagai salah satu solusi dimana pemekaran wilayah dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan secara lebih merata dan optimal melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan publik bagi masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan keinginan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi telah memberikan persetujuan pemekaran melalui Surat Keputusan (SK) tentang Persetujuan Pemekaran No. 17/Kep/172.2/DPRD/2009. Diikuti setelahnya oleh Surat Persetujuan Bupati Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Juli 2010. Seusai dengan hasil keputusan diatas, berdasarkan kajian dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bekasi, wilayah Kabupaten Bekasi akan dimekarkan menjadi Kabupaten Bekasi sebagai daerah induk yang terdiri dari 10 kecamatan dan Kabupaten Bekasi Utara sebagai daerah calon pemekaran dengan 13 kecamatan.

Permasalahan lain yang muncul dalam proses pemekaran wilayah adalah penentuan letak ibukota, ibukota adalah kota dari suatu

wilayah dimana pusat pemerintahan berkedudukan. Kota pertama-tama bukan tempat permukiman, melainkan pusat pelayanan (Daldjoeni,1999:38). Letak ibukota yang baru diharapkan dapat ditempatkan dengan tepat sehingga masalah-masalah yang menyebabkan pemekaran wilayah tidak sampai terjadi lagi. Penempatan ibukota dipilih berdasarkan kajian terhadap kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi ibukota.

Tujuan penelitian untuk: 1) Mengetahui kondisi sarana prasarana transportasi 2) mengukur tingkat aksesibilitas 3) menukur interaksi wilayah dan 4) memberikan pertimbangan lokasi Ibukota Kabupaten Bekasi Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diawali dengan penentuan calon ibukota dengan metode heksagonal Christaller. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa metode penelitian survei. Metode survei adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang bersamaan. Variabel yang digunakan dapat bersifat fisik maupun sosial (Tika,2005:6). Penelitian ini mempunyai obyek penelitian yaitu kecamatan yang menjadi calon lokasi ibukota pada daerah proyeksi pemekaran. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bekasi yang sedang berproses untuk pemekaran wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer yang diambil oleh peneliti berupa data pengukuran lapangan dan hasil kuesioner dari kegiatan wawancara. Sedangkan data sekunder meliputi data peta dan data lain yang terkait kependudukan. Data-data tersebut nantinya digunakan untuk memberikan pertimbangan lokasi ibukota. Peralatan penelitian meliputi seperangkat komputer, software Arc View GIS 3.3, Global Positioning System (GPS) dan Kamera.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi

observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan kuesioner. Teknik observasi dilakukan untuk menentukan titik lokasi koordinat dan jarak antar lokasi calon lokasi ibukota. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Selain menggunakan teknik observasi dan dokumentasi juga menggunakan teknik wawancara, teknik wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan pertanyaan kepada masyarakat untuk memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki oleh peneliti mengenai kondisi sarana prasarana transportasi. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1987:263). Analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif dan perhitungan rumus accesibility index, model gravitasi serta analisis perbandingan (skala) untuk memberikan pertimbangan lokasi ibukota.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sarana Prasana Transportasi Calon Lokasi Ibukota

Hasil kegiatan wawancara kepada masyarakat di kecamatan calon lokasi ibukota dari hasil skema heksagonal Christaller didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kondisi sarana prasarana transportasi Kecamatan Sukawangi secara umum yaitu belum tersedianya trayek angkutan umum, sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi atau ojeg untuk beraktivitas. Kondisi jalan di Kecamatan Sukawangi banyak yang rusak dan minim penerangan jalan. Masyarakat di Kecamatan Sukawangi sebagian besar belum mengetahui adanya rencana pemekaran wilayah, mereka hanya menginginkan lokasi ibukota baru hasil pemekaran dekat dari kecamatan mereka.

Kondisi sarana prasarana transportasi Kecamatan Tambelang secara umum yaitu sudah tersedia trayek angkutan umum, namun jumlahnya belum memadai. Kondisi jalan di Kecamatan Tambelang sudah cukup baik, tetapi

masih minim penerangan jalan. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tambelang sudah mengetahui adanya rencana pemekaran wilayah. Masyarakat cukup antusias bila Kecamatan Tambelang dijadikan Ibukota Kabupaten Bekasi Utara.

Kondisi sarana prasarana transportasi Kecamatan Sukatani secara umum yaitu sudah tersedia trayek angkutan umum yang memadai. Kondisi jalan dan penerangan jalan dalam kondisi yang cukup baik. Masyarakat di

Kecamatan Sukatani umumnya sudah mengetahui rencana pemekaran wilayah. Masyarakat di Kecamatan Sukatani mendukung dan antusias bila kecamatan mereka dijadikan Ibukota Kabupaten Bekasi Utara.

2. Tingkat Aksesibilitas Calon Lokasi Ibukota

Hasil perhitungan *Accessability index* terhadap kecamatan calon lokasi ibukota didapat hasil sebagai dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi Perhitungan *Accessability Index*

No	Nama Kecamatan	Rata-rata	Rangking
1	Sukawangi	301,94	3
2	Tambelang	406,78	2
3	Sukatani	515,52	1

Sumber: Hasil perhitungan

Nilai interaksi di Kecamatan Sukatani lebih besar dibandingkan dengan kecamatan calon ibukota lainnya karena sudah terdapat fasilitas publik seperti rumah sakit, pertokoan dan pasar. Sehingga memberikan pengaruh interaksi antar penduduk yang lebih besar. Nilai interaksi wilayah Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Sukatani relatif kecil karena masih

minimnya fasilitas publik untuk diakses.

3. Pertimbangan Lokasi Ibukota Kabupaten Bekasi Utara

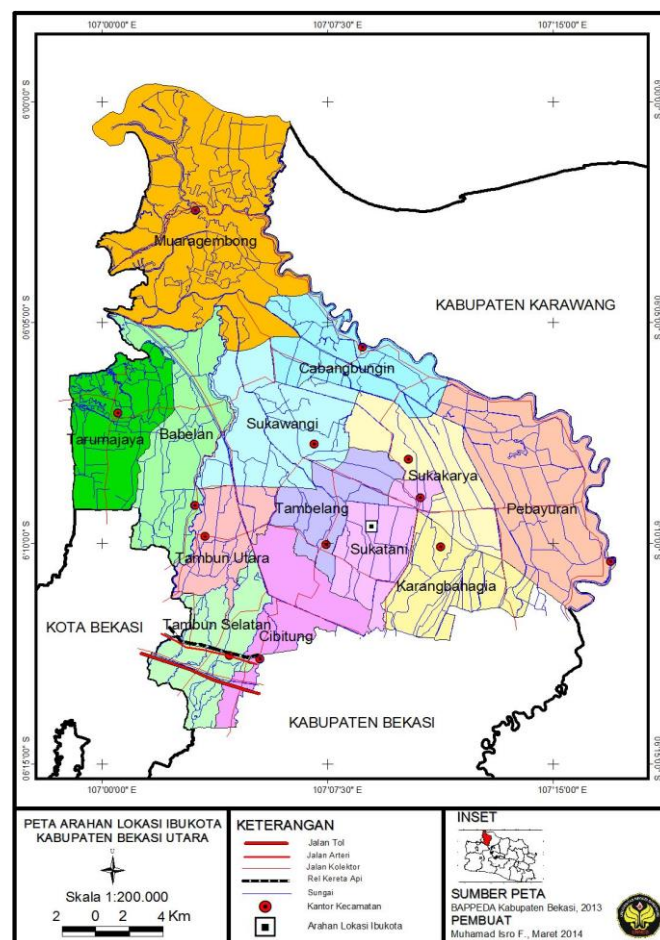
Pertimbangan lokasi ditentukan berdasarkan analisis perbandingan dari tiga analisis sebelumnya. Analisis perbandingan diterangkan dalam tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Potensi Calon Ibukota

No	Nama Kecamatan	Nilai Hasil Tiap Variabel		
		Tingkat Aksesibilitas	Interaksi Wilayah	Kondisi Sarana Prasarana Transportasi
1	Sukawangi	301,94	42.878.086,63	1
2	Tambelang	406,78	95.836.578,93	2
3	Sukatani	515,52	149.536.814,10	3

Skor Potensi Calon Ibukota						
No	Nama Kecamatan	Tingkat Aksesibilitas	Interaksi Wilayah	Kondisi Sarana Prasarana Transportasi	Total Skala	Prioritas Lokasi
1	Sukawangi	0,59	0,28	0,33	1,20	Ketiga
2	Tambelang	0,79	0,64	0,67	2,10	Kedua
3	Sukatani	1,00	1,00	1,00	3,00	Kesatu

Sumber: Hasil Analisis



Gambar 1. Peta Arahkan Lokasi Ibukota Kabupaten Bekasi Utara

Beberapa alasan umum untuk pertimbangan lokasi dibahas pada bagian berikut:

Prioritas pertama lokasi Ibukota Kabupaten Bekasi Utara adalah Kecamatan Sukatani. Kecamatan Sukatani menjadi lokasi yang cukup strategis, terlihat dari nilai aksesibilitas yang tinggi. Di Kecamatan

Sukatani sudah tersedia trayek angkutan umum dan kondisi jalan yang relatif baik. Dari faktor sarana prasarana ekonomi, Kecamatan Sukatani paling ekonomis untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan karena sudah didukung oleh adanya fasilitas publik seperti pasar, pertokoan, dan rumah sakit. Selain itu, dari faktor penggerak ekonomi juga sudah terdapat industri-

industri sedang. Kecamatan Sukatani juga memiliki dukungan serta antusias yang tinggi dari masyarakat untuk dijadikan Ibukota Kabupaten Bekasi Utara. Kendala dalam pengembangan daerah Kecamatan Sukatani relatif sedikit, yaitu kemungkinan teralih gunanya lahan pertanian yang relatif subur menjadi lahan terbangun.

Prioritas kedua lokasi Ibukota Kabupaten Bekasi Utara adalah Kecamatan Tambelang. Dari segi lokasi Kecamatan Tambelang relatif berada di tengah-tengah proyeksi wilayah administrasi Kabupaten Bekasi Utara. Lokasi tersebut diharapkan memberi pelayanan yang lebih merata. Dukungan dan antusias agar Kecamatan Tambelang dijadikan Ibukota Kabupaten Bekasi Utara oleh masyarakat juga menjadi nilai tambah. Kelemahan Kecamatan Tambelang yaitu dari aspek aksesibilitas seperti kondisi jalan yang rusak dan minimnya penerangan jalan. Fasilitas publik penggerak ekonomi seperti pasar juga belum tersedia. Dari faktor kelemahan tersebut mengakibatkan Kecamatan Tambelang relatif sulit untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan dan memerlukan biaya yang cukup besar.

Prioritas ketiga lokasi Ibukota Kabupaten Bekasi Utara adalah Kecamatan Sukawangi. Dari faktor lokasi Kecamatan Sukawangi memiliki letak wilayah yang berada di tengah-tengah proyeksi wilayah administrasi Kabupaten Bekasi Utara, sehingga berpotensi memberikan spend of control yang lebih merata. Kelemahan Kecamatan Sukawangi dalam hal aksesibilitas, yaitu belum tersedianya trayek angkutan umum, kondisi jalan yang rusak dan minimnya penerangan jalan. Selain itu, ketersediaan fasilitas publik lain yang masih minim membuat proses pengembangan daerah Kecamatan Sukawangi relatif sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar. Kemungkinan untuk mampu menjadi pusat pertumbuhan juga amat kecil.

KESIMPULAN

Penelitian ini diawali dengan analisis skema heksagonal Christaller, penelitian ini memberikan rekomendasi awal tiga calon

ibukota Kabupaten Bekasi Utara, yaitu Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Sukatani.

Hasil analisis kondisi sarana prasarana transportasi di tiga kecamatan calon lokasi ibukota menunjukkan masih terdapat adanya kekurangan, seperti kondisi jalan yang rusak dan minimnya penerangan jalan.

Accessibility index di Kecamatan Sukatani lebih tinggi dari Kecamatan calon ibukota lainnya. Tingginya Accessibility index dipengaruhi adanya industri sedang yang menyebabkan lebih banyak lapangan kerja.

Nilai interaksi di Kecamatan Sukatani lebih besar dibandingkan calon kecamatan calon ibukota lainnya. Hal ini dipengaruhi adanya fasilitas publik seperti pasar, pertokoan, dan rumah sakit.

Hasil Gabungan ketiga variabel menunjukkan bahwa Kecamatan Sukatani dengan skor 3,00 merupakan prioritas pertama calon Ibukota Kabupaten Bekasi Utara, Kecamatan Tambelang dengan skor 2,10 sebagai prioritas kedua, dan Kecamatan Sukawangi dengan skor 1,20 sebagai prioritas ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- _____.2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____.2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- BPS. 2013. Bekasi Dalam Angka. Bekasi. Bekasi: BPS
- Djaldjoeni, N. 1999. Geografi Kota Dan Desa. Bandung : Alumni
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah (Realita & Tantangan) Jakarta : Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1987. Metode Penelitian Survei. Yogyakarta: LP3ES
- Tika, Pabundu M., 2005. Metode Penelitian Geografi. Jakarta: Bumi Aksara

